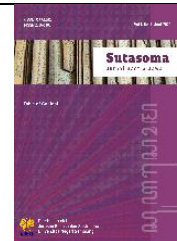




Sutasoma 11 (2) (2023)

Sutasoma: Jurnal Sastra Jawa

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/sutasoma>



Peran Perempuan dalam Politik Simbolis Pakubuwono X 1893-1939 M

Nilia Zaqiatul Miskiyah¹, Nur Baiti Rohmah²

^{1,2} Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung

Corresponding Author: nurulbaitirohmah@gmail.com

DOI: 10.15294/sutasoma.v11i2.69076

Accepted: May 26th, 2023 Approved: November 06th, 2023 Published: November 27th, 2023

Abstrak

Pada Kasunanan Surakarta perempuan menjadi bagian penentu kekuatan, ketahanan, dan keberhasilan bagi susuhunan dalam mencapai usaha politik. Perempuan sebagai istri, permaisuri, ratu, sahabat, anak, *abdi dalem*, dan rakyat biasa berperan penting di Kasunanan Surakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan perempuan pada strategi Pakubuwono X dalam mencapai tujuan dan stabilitas politik Kasunanan Surakarta 1893-1939 M. Keterlibatan perempuan berpengaruh atas sistem sosial dan budaya yang ada pada kasunanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian melalui tahap pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah), analisis dan sintesis, dan penulisan. Sumber yang digunakan berupa dokumen tertulis dari berbagai sumber pustaka, jurnal, penelitian ilmiah, atikel, dokumentasi, dan berbagai sumber yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan, kepemimpinan Pakubuwono X membawa kemajuan atas Kasunanan Surakarta. Kemajuan dan kejayaan Kasunanan Surakarta tidak luput dari kebijakan Pakubuwono X yang melibatkan perempuan dalam urusan politik. Pencapaian Pakubuwono X tidak lepas dari perempuan yang berperan penting dalam pertahanan pemerintah, peningkatan ekonomi, kemajuan pendidikan, karakteristik kasunanan, dan pelestarian tradisi budaya.

Kata kunci: Pakubuwono X; politik simbolis; peran perempuan

Abstract

In Surakarta Sunanate, women became the determinant of strength, resilience, and success for the susuhunan in achieving political endeavors. Women as wives, empresses, queens, friends, children, courtiers, and ordinary people play an important role in Surakarta Sunanate. The purpose of this study is to determine the involvement of women in Pakubuwono X strategy in achieving the goals and political stability of Surakarta Sunanate 1893-1939 M. The involvement of women influenced the social and cultural system in the Sunanate. This research uses the historical research method. The research went through the stages of topic selection, source collection, verification (historical criticism), analysis and synthesis, and writing. The sources used are written documents from various library sources, journals, scientific research, articles, documentation, and various sources related to the discussion. The results showed that the birth of Pakubuwono X brought progress to Surakarta Sunanate. The progress and glory of Surakarta Sunanate did not escape from Pakubuwono X policy of involving women in political affairs. Pakubuwono X achievements cannot be separated from women who play an important role in government defense, economic improvement, educational progress, Sunanate characteristics, and preservation of cultural traditions.

Keywords: Pakubuwono X; symbolic politics; role of women

© 2023 Universitas Negeri Semarang

p-ISSN 2252-6307

e-ISSN 2686-5408

PENDAHULUAN

Budaya secara universal di kelompokkan menjadi tujuh unsur yaitu bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 2003). Ketujuh unsur kebudayaan tersebut sering ditemukan pada kebudayaan Jawa utamanya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun demikian terdapat daerah-daerah yang secara kolektif dianggap sebagai pusat kebudayaan Jawa. Daerah tersebut adalah *daerah Kejawen*, yaitu daerah *Vorstenlanden* (Supriadi, 2017). Di mana daerah yang keberadaannya tidak lepas dari batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia-Belanda di samping tradisi menunjuk pada sebuah kemapanan budaya yang ada.

Kasunanan Surakarta merupakan bagian dari daerah *Vorstenlande* tentunya menjadi wilayah yang tradisi dan budayanya tumbuh subur. Pertumbuhan tradisi terjadi pada setiap kepemimpinan susuhunan dan bertumbuh subur setelah Kasunanan Surakarta mengalami perubahan yang signifikan setelah tertangkapnya Pakubuwono VI oleh pemerintah Belanda dengan tuduhan memberikan bantuan pada Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa (Aryoningprang et al., 2021). Dengan menghilangnya perlawanan fisik berskala besar pasca Perang Jawa, Surakarta sebagai daerah *Vorstenlanden* pun juga diharuskan untuk menandatangani *Korte Verklaring* pada setiap pergantian Raja baru (Aryoningprang et al., 2021) yaitu, sebuah perjanjian daerah yang berhak memerintah sendiri atau tidak diatur UU seperti daerah-daerah lain tetapi diatur dengan kontrak politik antara Gubernur jendral dan Pakubuwono X (ANRI, 2014). Sama halnya

dengan raja daerah lain, semasa kasunanan Pakubuwono VI sampai pada Pakubuwono X menjadikan kasunanan terfokus pada pembangunan, pemberdayaan dan penguatan identitas serta pengoptimalan budaya yang ada dengan memberdayakan lingkungan dan masyarakat kerajaan yang basisnya pada arsitektur dan juga kesenian dan kebudayaan setempat (ANRI, 2014; Aryoningprang et al., 2021). Hal ini nampak dalam penggunaan bahasa sebagai alat utama komunikasi, adat tradisi, gaya hidup, religi, mata petaharian, bentuk pemukiman, letak geografis, seni, tingkat pengetahuan, dan sebagainya yang ada di kasunanan (Supriadi, 2017).

Kuatnya kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda pada masa Pakubuwono X menjadikan sebuah tantangan terhadap stabilitas kerajaan, pasalnya pada masa pemerintahan Surakarta mengalami berbagai peningkatan keberlangsungan sistem kehidupan yang baik yang telah ada sejak Pakubuwono II dan dilanjutkan dari masa ke masa hingga sampai pada masa Pakubuwono X, sekaligus dihadapkan pada berbagai perkembangan modernisasi yang terus meningkat dan membawa pengaruh terhadap kerajaan. Pakubuwono memerintah Surakarta selama 46 tahun, tentu pada jangka tersebut memberikan sumbangsih besar terhadap Surakarta. Tidak salah ketika PB X disebut sebagai raja yang menurut *Wulangreh* (Pelajaran Kepemerintahan) adalah *wakil Hyang Agung* (wakil Tuhan). Raja yang mempunyai wahyu (isyarat gaib), yaitu *wahyu nurbuwah* berupa wewenang untuk menjadi raja alam semesta, *wahyu chukumah* berupa wewenang untuk mengadili, dan *wahyu wilayah* berupa wali Tuhan yang menjadi teladan

baik bagi rakyatnya. Ia juga menjadi *panatagama*, yaitu hak untuk menjadi pengatur agama bagi kawulanya. Ia juga mempunyai gelar yang amat panjang dengan menyebut semua bintang kehormatan dan pangkatnya yang selalu dituliskannya dalam surat-surat resmi raja. Koran-koran lokal menyebutnya dengan Gusti Pepunden Kulo Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (DK dalam Kuntowijoyo, 2003).

Hal tersebut dapat dijumpai dari berbagai sumber yang merekam jejak Pakubuwono X sekaligus jejak-jejak sejarah yang masih dapat dijumpai saat ini. Baik itu secara nyata atau tidak, Pakubuwono X mendedikasikan diri sepenuhnya untuk kerajaan mulai dari diri yang siap akan segala tuntutan penguasaan ilmu-ilmu, kehidupan, persepsi rakyat, adaptasi dan nasionalisme terhadap Jawa, sekaligus mencapai cita-cita terhadap kasunanan dan Surakarta semasa itu.

Sampai pada keikutsertaan kehidupan pribadi Pakubuwono X, yakni sebuah upaya mempertahankan trah Mataram menjadi bagian dari kebutuhan, kepentingan, sekaligus keberlangsungannya kasunanan. Sebuah keharusan bagi Pakubuwono X untuk menikah dengan putri kerajaan yang lahir dari keturunan Mataram. Di sisi lain Pakubuwono X memiliki permaisuri setia dua dan selir tiga puluh enam, namun tidak memiliki keturunan laki-laki yang dapat meregenerasi Pakubuwono X. Di bawah kuasa patriarki dan kepentingan politik, Pakubuwono X menikah dengan putri Hamengkubuwono VII sebagai bentuk pertahanan Wangsa Mataram dan menjadi sebab berkembangnya Surakarta sekaligus penunjang kejayaan kerajaan. Hal tersebut barengan dengan adanya deklarasi raja atas

rasa nasionalisme untuk bebas dari kuasa pemerintah Hindia-Belanda, sekaligus perayaan momen bahagia, dimana seluruh lapisan rakyat merayakan, tidak lain pemerintah Hindia-Belanda yang juga turut hadir dalam sebuah perayaan (Aryoningprang et al., 2021; Kuntowijoyo, 2003).

Hadirnya kesadaran-kesadaran akan kebutuhan dan juga kepentingan masa depan, banyak hal yang dilakukan oleh Pakubuwono X melalui progres kerja yaitu prakti-praktik politik simbolis sekaligus upaya politik oportunistik baik dari pembangunan infrastruktur kerajaan, penguatan identitas, terlaksananya tradisi, dan budaya lainnya. Di mana hal tersebut menjadikan keterlibatan perempuan dalam menyukseskan segala urusan dan kepentingan pemerintah kasunanan dan susuhunan. Namun demikian, peran perempuan tidaklah teridentifikasi secara menyeluruh layaknya pencapaian-pencapaian sekaligus proses perjalannya kasunanan. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya peleburan sejarah terkait peran-peran perempuan yang turut mewarnai keberlangsungan kehidupan politik, tradisi, budaya, Pendidikan, dan ekonomi kerajaan yang terjadi pada masa lalu.

Meninjau penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan: *Pertama*, Hermanu Joebagio dalam karyanya yang berjudul *Politik Simbolis Kasunanan* membahas tentang perwujudan dari tugas dan tanggungjawab Pakubuwono X sebagai raja dalam mengelola wilayah konsentrisnya (*Nagara* (ibukota), *narawita* (tanah mahkota), *Naragung* (tanah lungguh), *Mancanagara*, dan Pesisir dengan memainkan simbol-simbol politik, yang

kemudian hak tersebut disebut dengan politik symbol (Joebagio, 2015).

Kedua, Banyu Aryoningprang, Umasih, dan Kurniawati, dalam karyanya yang berjudul *Pakubuwono X: Politik Oportunisme Raja Jawa (1893-1929)*, membahas tentang politik oportunitisme Pakubuwono X pada masa pemerintahannya yakni pada tahun 1893 sampai 1939 M, di mana Pakubuwono X melakukan hal-hal positif dari kepentingan pribadi dan kebaikan masa depan kerajaan sebagai kekuatan dari dalam untuk terus melanjutkan perjuangan melawan pemerintah Hindia-Belanda (Aryoningprang et al., 2021). Strategi-strategi yang dibangunnya meliputi kekuasaan intern kerajaan dan juga antar eksternal kasunanan. Hal-hal yang dilakukan Pakubuwono X adalah membangun hubungan baik dengan raja Hamengkubuwono VII, Mangkunegara IV, pemimpin-pemimpin daerah, pendekatan pada masyarakat untuk menarik perhatian, serta ikut serta dalam berbagai peran untuk mendapatkan kepercayaan pemerintah Hindia-Belanda, dan mencapai konsentrasi nasionalismenya dalam mewujudkan berbagai lembaga-lembaga organisasi, pendidikan, pemberdayaan, serta berkontribusi langsung di dalamnya (Aryoningprang et al., 2021).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kuntowijoyo dengan judul karyanya *Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa Di Kasunanan Surakarta, 1900-1915*. Di dalamnya membahas terkait berbagai bentuk dari pelarian Pakubuwono X dari kenyataan situasi kasunanan pada masa 1900-1915 M (Kuntowijoyo, 2003). Di mana Kasunanan Surakarta berada di bawah kuasa pemerintah Hindia-Belanda. Ditunjukkan pula dalam

pembahasan mengenai bagaimana tindakan yang menjadikan kasunanan, susuhunan, priyayi, dan wong cilik biasa di Kasunanan Surakarta pada 1900-1915 M yang terperangkap dalam sistem simbol. Kuatnya simbol-simbol identitas sebagai pembeda di antaranya terjadi begitu mudah dan terus ada. Sehingga adanya simbol-simbol menjadi pengaruh bagi mereka yang di Solo dalam memahami kehidupan sehari-hari, keseluruhan fakta sosial, dan gambarannya mengenai dunia secara menyeluruh (Kuntowijoyo, 2003).

Dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebuah usaha seorang pemimpin tidak luput pada sebuah kerjasama yang baik antar berbagai pihak, termasuk pada sistem pemerintahan dan juga pada pemerintahan itu sendiri. Pada pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X membuktikan terdapat beberapa hasil kejayaan yang tidak luput dari berbagai peran yang berjalan dengan baik. Berbagai peran berjalan sebagaimana mestinya, termasuk peran yang dijalankan oleh seorang perempuan. Namun keberadaan perempuan tidaklah terbahas secara menyeluruh dalam pembahasan peneliti tersebut, hanya pada usaha dan pencapaiannya dalam pemerintah tanpa mengaitkan pada peranan perempuan dalam ikut serta mendukung, dan menyukseskan dalam berbagai urusan dan bagian tertentu.

Perlu adanya rangkaian pembahasan mengenai peran perempuan di Kasunanan Surakarta guna melengkapi informasi sekaligus sebagai kelengkapan pembahasan mengenai peran perempuan di Kasunanan Surakarta yang terlibat penting dalam urusan politik pemerintahan Susuhunan Pakubuwono X pada 1893-1939 M. Demikian penelitian ini dilakukan untuk melengkapi pembahasan terkait

hal tersebut yang diinterpretasikan dari hasil pelacakan ulang mengenai biografi singkat Pakubuwono X, strategi politik dalam pemerintahan dan praktik simbolis yang melibatkan perempuan dalam mewujudkan cita-cita Pakubuwono X pada Kasunanan Surakarta yang terdapat pada ulasan pembahasan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya pengulasan kembali terkait praktik-praktik simbolis Pakubuwono X untuk mengidentifikasi kiprah perempuan dalam keterlibatannya membangun berbagai aspek pada Kasunanan Surakarta, hingga mencapai pada kejayaan Susuhunan PB X pada masa kepemimpinan tahun 1893-1939 M. Sejarah peran perempuan pada masa 1893-1939 M sebagai pelaku tradisi, budaya, dan pelestari atasnya, sangatlah berhubungan erat dari pada tradisi masyarakat saat ini. Sebagai evaluasi dan kecocokan pada nilai dari tradisi dan budaya yang bernilai tinggi bagi kehidupan saat ini, serta sebagai upaya penjagaan dan identitas, maka perlu sebuah pengulasan kembali terkait peranan perempuan dan kontribusinya dalam membangun peradaban. Demikian penelitian ini berjudul *Peran Perempuan dalam Politik Simbolis Pakubuwono X Tahun 1893-1939 M*. Permasalahan dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, merunut bagaimana biografi Pakubuwono X sebagai pelaku sejarah sekaligus tokoh yang mencampuri lahirnya budaya di masa pemerintahannya?. *Kedua*, bagaimana peran perempuan dalam strategi kepemimpinan Pakubuwono X dalam mempertahankan wilayah Surakarta sebagai wilayah *Vorstenlanden* yang harus tetap terjaga stabilitas politiknya agar

tidak menjadi kekuasaan penuh pemerintah Hindia-Belanda?.

Tujuan penelitian adalah mengetahui riwayat hidup Pakubuwono X sebagai raja dalam mempertahankan Kasunanan Surakarta dari kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda dengan berbagai strategi politik berdasarkan simbol dan oportunisme, yang didukung oleh berbagai peranan perempuan dalam menciptakan kelancaran dan stabilitas politik dengan baik, sekaligus kontribusi perempuan terhadap kasunanan dalam menjadikan Kasunanan Surakarta pada masa Susuhunan Pakubuwono X tahun 1893-1939 M disebut-sebut era kejayaan Kasunanan Surakarta.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai nilai-nilai pendidikan, memberi pengajaran (instruktif), inspiratif (memberi ilham), dan reaktif (memberi kesenangan) pada peristiwa masa lampau perlu sebuah pengangkatan pembahasan kembali melalui prosedur penelitian sejarah untuk mencapai manfaat dan fungsi pada kehidupan saat ini (Wasino & Endah Sri, 2018), sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penelitian *Peran Perempuan dalam Politik Simbolis Pakubuwono X Tahun 1893-1939* adalah pendekatan historis. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan meliputi: (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi (kritik sejarah), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) penulisan (Kuntowijoyo, 2013). Topik dalam penelitian ini peran perempuan dalam politik simbolis Pakubuwono X pada tahun 1893-1939. Sumber data yang digunakan berupa dokumen tertulis dari berbagai sumber pustaka, jurnal, penelitian ilmiah, artikel, artefak, dokumentasi, berbagai sumber yang berkaitan

dengan pembahasan, dan kebutuhan penelitian lainnya. Data yang sudah didapat dilakukan proses verifikasi untuk mendapatkan keabsahan dilanjutkan dengan proses penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah. Tahap akhir adalah penulisan sejarah yang dilakukan secara berurutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Pakubuwono X

Berbagai sumber menyatakan bahwa, masa kejayaan Surakarta dicapai pada masa pemerintahan kasunanan Pakubuwono X, selama 46 tahun sejak dimulai kekuasaannya pada tahun 1893-1939 M. Pakubuwono X atau kemudian biasa disingkat dengan PB X bernama asli Sri Susuhunan Pakubuwono X lahir pada 29 November 1866, PB X dengan nama kecil Raden Mas Gusti Sayidin Malikul Kusna merupakan putra dari Pakubuwono IX dengan permaisuri Raden Ajeng Kustijah (Aryoningprang et al., 2021). Kelahirannya sebagai putra ke-30 Pakubuwono IX disambut meriah oleh warga Surakarta dikarenakan selama pemerintahannya, putra putri Pakubuwono IX tidak lahir dari permaisuri, melainkan dari para selirnya (Aryoningprang et al., 2021). Pakubuwono X atau PB X diangkat menjadi putra mahkota pada umur 3 tahun, sebagai putra mahkota PB X mendapatkan pendidikan informal secara intensif sampai dewasa, meskipun pendidikan Barat (ELS) sudah berdiri di Surakarta sejak tahun 1852, tidaklah menjadikan pengajaran secara intensif penerus kasunanan mengikuti perkembangan budaya begitu saja (Adam dalam Joebagio, 2015)

PB X diangkat sebagai pangeran Adipati Anom dengan gelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Narendra Amangkunegara Sudibya*

Rajaputra Narendra Mataram V Ing Kraton Surakarta Hadiningrat. Sebagaimana adipati pada umumnya, PB X mengenyam serangkaian pendidikan meliputi agama Islam dan spiritual (tasawuf), pengetahuan kesusastraan, ketrampilan *kanuragan*, kesenian, pendidikan dari buku-buku, keterampilan bersenjata, ajaran PB IX dalam serat *piwulang* Jawa, psikologi, kejiwaan, bahasa Arab, bahasa Melayu, dan bahasa Belanda (Aryoningprang et al., 2021; Joebagio, 2015).

Sepeninggal ayah PB X pada 16 Maret 1893 tanda sebuah kekosongan dan pengganti raja harus segera ditetapkan. PB X resmi menggantikan ayahnya pada 30 Maret 1893 dengan gelar *Sampeyan Dalem Inggang Sayidin Panotogomo Inggang Jumeneng Kaping Sedasa Ing Nagari Hadiningrat*. Diangkatnya sebagai raja tidaklah serta merta pada kebebasan atas kepemimpinan yang dijalankan. Pada masa pemerintahan PB X mengalami banyak tekanan sekaligus tuntutan mengingat ketetapan pemerintah Hindia Belanda atas daerah ketetapannya sebagai *vornstenlanden*, di mana adanya hal tersebut menjadikan stabilitas pemerintahan PB X terganggu, sehingga dalam mengimbangi stabilitas politik PB X memusatkan kepemimpinannya pada pembangunan walaupun benturan antara simbol dan kekuasaannya sangat bertentangan keras. Simbol-simbol kerajaannya merujuk pada kenyataan yang nyaris di luar batas, namun kenyataannya kekuasaan PB X berada di bawah kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Hal tersebut menjadi ketimpangan yang berlanjut, mengingat lahirnya simbol dapat membawa sebuah interpretasi secara universal yang ini dapat menjadi dampak pada sebuah sistem

karajaan (Aryoningprang et al., 2021; Kuntowijoyo, 2003).

Saat usia 7 tahun PB X sering mengikuti ayahnya dalam pertemua-pertemuan residen Hindia-Belanda, sehingga semasa cukup usia dan pengalamannya terkadang datang dalam pertemuan sebagai wakil ayahnya dengan didampingi oleh para pangeran yang lebih tua dan patih dalem yang selalu membersamai (Banyu et al., 2021). Naiknya tahta PB X pada usia 27 dan pengalaman bertugasnya, menjadikan ancaman pada pemerintahan Hindia-Belanda, sehingga sebagaimana raja-raja baru di daerah *vorstenlenden* keharusan menandatangani sebuah perjanjian dilakukannya. Perjanjian tersebut disebut dengan perjanjian *Verklaring* yang berisi tentang perbaikan pengadilan, kepolisian dan penyelesaiannya menurut hukum; daerah terselip (*enclave*); ganti rugi dari pemerintah (Belanda); pemungutan pajak baru; penyewaan tanah kepada orang asing; kerja wajib bagi penduduk yang tinggal di daerah yang dikuasai oleh orang asing (umumnya pengusaha) yang ini dilakukan oleh PB X pada 25 Maret 1893 (Sumodiningrat dalam Aryoningprang, 2021).

Dengan keterbatasan kebijakan PB X tetap dapat menjalankan stabilitas kerajaan sebagaimana yang telah ada dibantu oleh berbagai pengikut setianya dengan menjalankan masing-masing peranan dengan baik, hanya saja mengubah strategi bertahan untuk tetap dapat berkompetisi dengan Hindia-Belanda dan berkuasa penuh atas Surakarta. Walaupun demikian pemerintah Belanda berkuasa penuh atas politik, ekonomi, sekaligus peradilan daerah kekuasaan PB X (Aryoningprang et al., 2021; Joebagio, 2015).

Peran Perempuan dalam Strategi Kepemimpinan Pakubuwono X 1893-1939 M

Di tengah tekanan pemerintah Hindia-Belanda yang menuntut kepiawaian PB X dalam mengelola suasana politik daerah Surakarta tetap stabil, Susuhunan PB X tidak luput pada ketentuan perjanjian *Verklaring*. Hal tersebut tidak menjadikan PB X terpaku. Dalam himpitan keadaan politik, PB X membuat kompensasi sebagai upaya menepis kenyataan dengan mengekspresikan diri dalam tiga acara, yaitu melakukan pengembangan *emotional intelligence* (kecerdasan emosional) yang menjadi pembawaannya, pembawaan hedonisme dan nasionalisme Jawa (Joebagio, 2015; Kuntowijoyo, 2003). PB X mewujudkan strategi politiknya dalam praktik politik simbol atas dasar pertimbangan: (1) kehilangannya *power* pada wilayah konsentris yang diambil alih oleh pemerintah Hindia-Belanda, di mana hanya istana dan tanah *narawita* yang hanya tertinggal untuk Susuhunan sebagai penghasilan keluarga. Realitas politik tidak menjadi tafsir bagi sunan sebagai tidak berdaya atas kewajiban, tanggungjawab sosial, dan tugas sebagai elit politik tradisional; (2) hadirnya kelompok-kelompok elit dan kelas baru serta eksistensi sosial politik di luar pembinaan; (3) Banyaknya kaum nasionalis baru yang kemudian menganggapnya sebagai elit tradisonal yang tidak menunjuk pada penampilan baik.

PB X mewujudkannya dalam sebuah pemberdayaan. Baik pemberdayaan dalam bidang sosial masyarakat, budaya, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Di mana PB X menjadikan pula perempuan turut menjadi bagian pada pemberdayaan di Kasunanan Surakarta. Sampai pada perempuan menduduki

bagian penting dalam penentu keberhasilan perjuangan politik simbolis PB X pada masa 1893-1939 M. Peran perempuan sebagai istri, permaisuri, ratu, sahabat, anak, *abdi dalem*, dan rakyat biasa, penting dalam politik PB X. Hal ini terbukti adanya pernikahan PB X dengan Putri Mangkunegara IV yang bernama Raden Ajeng Sumarti bergelar GKR Pakubuwono yang melahirkan terbangunnya hubungan baik pada pemerintahan Mangkunegara masa itu. Saat permaisuri tidak dapat memberikan keturunan putra mahkota, PB X kembali menikah dengan seorang putri Kasultanan Yogyakarta keturunan Kerajaan Mataram untuk mempertahankan trah kerajaan sekaligus sebagai penerus kejayaan dan penerus masa depan kasunanan, baik dalam sistem sosial, budaya dan juga stabilitas politik. PB X memutuskan menikah lagi dengan Putri Hamengkubono VII yang bernama Gusti Raden Ajeng Marsudarinah dengan bergelar GKR Hemas. pernikahannya menjadi tanda sebuah deklarasi nasionalisme Jawa dan kota Solo serta terdapat pesta kolosal, yang semua lapisan masyarakat turut merayakan (Aryoningprang et al., 2021; Joebagio, 2015).

Demikian PB X disebut sebagai wujud dari raja yang menurut *Wulangreh* (Pelajaran Kepemerintahan) sebagai *wakil Hyang Agung* (wakil Tuhan). Raja yang mempunyai wahyu (isyarat gaib), yaitu *wahyu nurbuwah* berupa wewenang untuk menjadi raja alam semesta, *wahyu chukumah* berupa wewenang untuk mengadili, dan *wahyu wilayah* berupa wali Tuhan yang menjadi teladan baik bagi rakyatnya. Ia juga menjadi *panatagama*, yaitu hak untuk menjadi pengatur agama bagi kawulanya. PB X juga mempunyai gelar yang amat panjang dengan menyebut semua bintang kehormatan, dan

pangkatnya yang selalu ditulisnya dalam surat-surat resmi. Koran-koran lokal menyebutnya dengan *Gusti Pepunden Kulo Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Susuhunan* (Kuntowijoyo, 2003). Melahirkan berbagai karya kepemimpinan yang mampu mencapai masa kejayaan Kasunanan Surakarta.

Berawal dari hal-hal yang memicu anggapan pemerintah Hindia-Belanda pada PB X sebagai tokoh sentral yang dianggap membingungkan, bahkan seorang tokoh di luar prasangka 13 orang residen dan gubernur Pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1893 hingga 1939. Anggapan tersebut memuat PB X sebagai raja yang lemah, tidak cakap, beristri banyak, suka makan, kesukaannya atas perempuan, dan sikap kepatuhannya yang tinggi, menjadikan pengkaburan atas kewaspadaan pemerintah Hindia-Belanda. PB X dalam sosial masyarakatnya juga terkenal dengan hedonis dan keras, menjadikan sebuah kelancaran urusan politiknya semakin berkembang pesat.

Kepercayaan-kepercayaan dari berbagai elemen, menjadikan sebuah bekal utama PB X dalam menjalankan roda keperintahannya. Di mana hal tersebut berhasil didapatkannya melalui sebuah upaya keberhasilan juru masak susuhunan dalam mempertahankan kenikmatan masakan sehingga kegemaran makan PB X semakin meningkat. Di samping itu kecintaan atas gemerlap-kemewahan, dan kesenangan pada pakaian kebesaran beserta seluruh lencana dan bintang-bintang kehormatan memicu sindiran orang-orang Belanda di samping sebuah keberuntungan tengah didapatkan PB X (tentang tanda kebesaran yang sering digunakan PB X secara berlebihan yang dipasangnya pada punggung sekalipun), hal tersebut juga dilakukan dengan sisi lain sebagai identitasnya sebagai raja

sebagaimana ditetapkan pada aturan terdahulunya, termasuk pada perundang-undangan PB IV tentang ketentuan pakaian, atas hak pakaian raja yang menunjukkan keindahan, kebesaran, dan kemewahan. Berbeda dengan priyayi dan wong cilik yang tidak semua dapat memakainya. Larangan atas pakaian tersebut berlaku bagi semua orang asing, seperti Cina, Koja, Bugis, dan Bali tetapi tidak untuk orang Belanda (Kuntowijoyo, 2003).

Dalam sebuah upacara pemberian Payung Srinugroho, sebuah koran lokal Darmo Konda menggambarkan bahwa raja memakai lima belas macam pakaian kebesaran, termasuk mahkota *kanigoro* yang bertahtakan intan dan sepatu beludru (DK dalam Kuntowijoyo, 2003). Tidak hanya itu anggapan Pemerintah Hindia Belanda atas kepercayaan PB X memiliki kekuatan goib atau kesaktian dalam menyembuhkan orang-orang sakit, keris, dan senjatanya menambah keterkecohan Hindia Belanda atas PB X. Ditambah keterkecohan atas prediksi usia PB X atas kegemaran makan tanpa memperhatikan asupan makanannya menjadi sebab kaburnya kewaspadaan pemerintah kolonial.

Di usia dewasa hingga lansia PB X, gradasi watak dan karakteristik kepemimpinannya semakin terlihat pekat. Kepiawaian PB X menebas segala anggapan pemerintah Hindia Belanda atas ketidakcakapan dalam keuangan pemerintah sekaligus administrasi tergradasi dalam kerja pemerintahan yang melakukan sebuah pemberdayaan atas pendidikan untuk mencapai sebuah kecakapan pengelola pemerintahan. Ketegasan atas ganti patih yang berkuasa pada pemerintahnya, menambah kekuasaannya semakin meningkat. Sekaligus perhatian rakyatnya atas ketangguhan dan kebesarannya berhasil direbut

pada upacara-upacara kebesaran dan juga politik dengan pakaian gemerlapnya. Di sisi lain PB X dapat menaklukkan pertentangan yang serius atas rasa nasionalisme terhadap Surakarta dengan mengadopsi kebiasaan mereka dan bekerja sama dengan pemerintahan kolonial dalam sektor pertanian, ditambah kemahiran menghadapi pemerintah Hindia Belanda, menjadikan PB X tampil sebagai teman pemerintah Hindia Belanda, sehingga persepsi mereka menumbuhkan kesalahfahaman atas PB X, yang kemudian PB X memperoleh sebuah bintang penghargaan dari Ratu Wihelmina (Aryoningprang et al., 2021).

Naiknya tahta PB X pada tahun 1893 hingga akhir masa wafatnya, tidak lepas dari anggapan loyalitas kontrak politik terhadap pemerintah kolonial dan juga kehormatan dan kewibawaan di mata rakyatnya. Hal ini menjadikan *power* (kekuasaan) PB X dalam diri dan juga otoritas sosial, budaya, politik yang diolahnya dengan memberdayakan masyarakat, mengalami peningkatan yang pesat. Dimana raja berwujud sebagai raja yang adil sebagaimana wakil Tuhan bijaksana yang dipercayakan warganya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai susuhunan untuk memelihara nilai-nilai keharmonisan dan mencapai cita-citanya atas Surakarta.

PB X memberi sumbangsih atas terbentuknya sistem sosial dan juga politik di Susuhunan Surakarta sekaligus penyumbang atas kemajuan kebudayaan Jawa di Surakarta, dimana simbol-simbol Islam dan Jawa berlangsung ditangannya (Kuntowijoyo, 2003). Pada masa PB X tradisi Islam yang paling menonjol dilakukan oleh PB X ada pada bulan Maulud. Setiap bulan Maulud PB X pergi ke masjid untuk memberi sedekah pada orang Arab,

Benggal, Koja, Banjar, dan para haji yang berdzikir, serta bagi pendatang yang datang bukan saja dari Solo, tetapi juga dari berbagai kota-kota lain. Tidak hanya itu grebeg Mulud, Besar, puasa, hari raya dan juga tradisi dan mitos Jawa juga dipelihara. Terbukti dengan adanya grebeg Mulud pada *abdi dalem* dengan berjalan kaki sejauh 20 km membawa air dari mata Pengging dengan tempayan. PB X juga memberi sesaji Mahesalawung berupa berbagai macam daging untuk para lelembut yang dikepalai Betari Durga di hutan Kendrawahana (Kaliyasa, Surakarta) (Carlina, 2020; Kuntowijoyo, 2003).

Demikian kepercayaan rakyat yang percaya pada kekeramatan Brajanala (haluan kapal), Kyai Slamet (kerbau), Kyai Sengkelat (keris), Kyai Sapujagat (meriam), gamelan sekaten, beringin kembar, gajah, dan jimat-jimat lain (Kuntowijoyo, 2003). Lahirnya simbol-simbol sejak awal 1900an dalam bidang ekonomi, Kesehatan, dan keterampilan turut mewarnai kesadaran atas kemajuan di wilayah otoritasnya yakni pada sosial dan budaya terkhusus kesadaran akan peran penting perempuan yang ikut serta menyertai di dalamnya. Dengan ditandainya sebuah renovasi dan pendirian; (1) Pasar Gedhe Hardjonagara, (2) Bank *Bandhalumakso* yang berperan sebagai pemberi pinjaman kepada *abdi dalem* untuk perbaikan rumah ketika wabah pes melanda Surakarta, (3) Jembatan Jurug, (4) jalan dan penerangan, (5) klinik kesehatan *Panti Rogo* dan apotik *Pantihusodo* yang berada di bawah pengelolaan dinas *Kridha Nirmolo*, (6) Kebon Rojo (Sriwedari) dan Taman Tirtonadi, (7) *rijksstudiefond*, lembaga yang memberi beasiswa *sentana* dan *abdi dalem* (8) Radya Pustaka, (9)

pendirian Panti Sosial Wangkoeng merupakan panti merawat penyakit pes dan kusta (Joebagio, 2015).

Hadirnya bangunan-bangunan tersebut menjadikan sebuah kebebasan berkarya, ruang praktik dan segala hal yang menyangkut pengabdian terbuka lebar pada seluruh *abdi dalem* dan orang-orang yang mahir di dalamnya, tidak luput dari laki-laki dan perempuan di lingkungan Kasunanan Surakarta. Hal ini wujud simbol susuhunan dalam bentuk bangunan yang mengisyaratkan tentang sebuah harapan terciptanya struktur peluang ekonomi dan politik yang tinggi bagi masyarakat dan pemerintah. Di mana terbentuknya jaringan masyarakat luas sekaligus penunjang urusan kepentingan PB X dalam membangun relasi dan juga hubungan baik antar manca nagara (Joebagio, 2015).

PB X merupakan sultan yang senang bermewah-mewahan, gemerlap, mewah, dan indah. Ketetapan pakaian yang menyangkut pakaian pada *abdi dalem* menjadikan kebutuhan batik meningkat, hal tersebut menjadikan loyalitas perempuan bertambah meningkat dalam mendedikasikan hidupnya demi kehormatan kerajaan sekaligus sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat (Aryoningprang et al., 2021; Kuntowijoyo, 2003). Dicatat dalam keraton, raja dikelilingi oleh para bangsawan dan juga *abdi dalem* yang jumlahnya sekitar 10.000, dengan 6.300 bangsawan dan 3.700 *abdi dalem*, bahkan melebihi hitungan tersebut, karena jumlah *abdi dalem* yang sebenarnya sulit dihitung dan bercampur, dengan menempati 20 jabatan termasuk *abdi dalem* yang menyertai sultan berpergian sejumlah 200 orang, *sarotono* (ulama), *bedhaya* (penari), *koki* (pemasak), *pamutihan* (agama), *jurukunci*

(penjaga kubur), *perdikan* (desa bebas pajak), dan lain sebagainya (Kuntowijoyo, 2003).

Adanya kebutuhan batik di lingkungan Kasunanan yang semakin meningkat, artinya abdi perempuan pembatik dituntut kelayakannya dalam mempertahankan nilai dan kualitas batik Kasunanan Surakarta. Demikian juga semakin meningkatnya kebutuhan menjadikan kegiatan produksi pembuatannya tidak lagi memungkinkan jika hanya bergantung kepada para putri dan *abdi dalem* keraton. Hal ini dilakukannya dengan cara batik dibuat di luar keraton oleh kerabat dan *abdi dalem* yang bertempat tinggal di luar keraton. Oleh karena banyaknya pengikut PB X baik kerabat atau *abdi dalem* yang tinggal di keraton, memberi pengaruh besar terhadap sosial budaya di luar susuhunan, demikian pula seni batik yang dibawa mereka ke luar kraton dan dikerjakan ditempat masing-masing (Tri wahyono et al., 2014). Disisi lain juga, adanya kegiatan tersebut menjadikan keuntungan tersendiri bagi perempuan, pasalnya hadir sebuah perkumpulan perempuan-perempuan dalam berkarya di batik, yang kemudian perempuan dapat berdayaguna sekaligus sejahtera, lantaran hadirnya industri batik di Surakarta tepatnya di kawasan Kauman dan juga kawasan Lawean, yang ini kemudian juga menjadi bukti stabilitas ekonomi dalam daerah *vorstenlenden* (Tri wahyono et al, 2014; Banyu et al., 2021).

Batik memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan kerajaan Pakubuwono X, sebuah makna atau arti yang erat hubungannya dengan falsafah hidup yang diciptakan melalui simbol atau lambang dalam bentuk motif-motif khas dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur, (Pujuyabto, 2013) berhubungan hal tersebut

tidaklah mudah kaitannya dengan kegiatan membatik. Pemusatan pikiran, kebersihan jiwa, kesabaran, ketelitian dan juga ketelatenan dibutuhkan dalam proses pembuatan. Hal ini akan berpengaruh pada hasil, di mana ragam hias atau motif serta pewarnaannya mengandung nilai perlambangan, pandangan hidup, sekaligus mantra atau permohonan. Dengan demikian seorang pembatik akan sendirinya melalui olah rasa dalam menghidupkan kepekaan dan ketatanan hidup lantaran proses membatik. Ditambah sebuah hasil akan menambah sebuah pepaduan yang mengagumkan yang ini menjadikan kepuasan dan kebanggaan tersendiri sehingga sebuah seni, adat, pandangan hidup, dan kepribadian lingkungan akan lahir serta tercipta sempurna dalam sebuah karya (Tri Wahyono et al., 2014; Ngatinah, 2018).

Dalam kerajaan Surakarta batik merupakan bagian dari kesakralan, kekuatan budaya, dan juga tradisi, di mana batik merupakan manifestasi keseimbangan hidup yang sengaja diciptakan berdasar motif dan juga tingkat sosial dalam masyarakat. Karya-karya batik tersebut dapat dilihat dari dokumentasi susuhunan PB X, di mana setiap acara dan momenta bahkan keseharian permaisuri dan para abdinya terlihat mengenakan pakaian yang bernuansa batik. Secara Surakarta memiliki ciri khas batik mulai dari keindahan, motif, warna, dan corak sendiri, sehingga menjadikan identitas bagi kerjaan Surakarta. Dengan keberhasilan perempuan mengangkat bidang batik tentu saja mengangkat status para perempuan dari anggapan tradisionalisme yang ada sekaligus peningkatan kualitas diri pada kehidupan baik perempuan itu sendiri dan juga laki-laki semakin meningkat. Adanya pemaknaan secara batiniah menggiring karakter

menjadi sebuah jati diri yang baik sebagaimana setiap titik batik yang mengandung nilai-nilai luhur serta ketrentraman dalam hidup (Anisah & Tohjiwa, 2017).

Turut sertanya perempuan dalam menunjang politik dan ekonomi, menjadikan perkembangan kerajaan berlangsung pesat dalam bidang hubungan kerja, pembangunan, domestik kerajaan, pendidikan formal maupun non formal. Hadirnya pendidikan Islam, menambah keterbukaan atas mengenyam pendidikan dan juga adanya tulisan langsung dari PB X yang ditujukan langsung pada penyebutan anak perempuannya, menjadi sebuah tanda gerbang pengetahuan bagi generasinya sekaligus perempuan yang menempati urgensi dalam kehidupan semasa kerajaan dan masa yang akan datang. Dengan nyata keterbukaan pintu pengetahuan semakin dekat dan terbuka bagi perempuan. Keterbukaan itu ditandai dengan hadirnya kesadaran PB X atas kebutuhan dan juga masa depan akan pentingnya orang-orang yang cakap dalam mengurus susuhunan serta mampu menjadi orang-orang yang juga sadar akan kondisi situasi agar dapat berevolusi.

Perhatian PB X atas penyaluran beasiswa dan pendidikan untuk masyarakat Surakarta meliputi pemanfaatan atas peluang dari pemerintah Eropa berupa beasiswa untuk para bangsawan keraton dan priyayi yang berpotensi dan berprestasi. Harapannya agar dapat berwawasan dan memiliki kepintaran sebagaimana orang-orang Eropa untuk dapat mengimbangi perkembangan semasa pemerintahannya dan juga mengadakan lembaga pendidikan yang diperuntukkan untuk anak-anak yang tidak terakomodasi dalam sistem pemerintahan kolonial, serta memberi

pengetahuan keterampilan membuat, pertukangan, pedalangan, dan alat-alat kebutuhan rumah tangga. Di mana seluruh pendidikan merupakan kebutuhan masa itu dan juga sebuah penunjang bagi rakyatnya dalam angkatan kerja profesional dan intelektualitas rakyat dipenuhi secara penuh oleh Pakubuwono, mengingat kemahiran rakyat dalam berbagi bidang menjadi bagian dari pendukung usaha pemerintah, terkhusus pada bidang mengelola administrasi kerajaan (Joebagio, 2015).

PB X berupaya mendelegasikan para keluarga kerajaan atau para bangsaan dan abdi berprestasinya dalam ajang beasiswa yang diberikan oleh Eropa. Dalam perkembangannya kemunculan pendidikan dengan sistem pemerintah Kolonial pada awal abad 20 dan di samping deskriminasi pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menjadikan semangat bagi PB X untuk mendirikan sekolah-sekolah baik madrasah dan sekolah umum (Joebagio, 2015; Mulyanto et al., 2019)

Perkembangan yang dinamis awal abad 20 menghadirkan berbagai elemen pendidikan dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing, seperti mendirikan sekolah untuk keluarga kerajaan, mendirikan sekolah untuk *abdi dalem*, menghimpun pesantren, mendirikan sekolah anak yatim, Madrasah Mambaul Ulum di Surakarta tahun 1905, Madrasah Taswirul Afkar tahun 1914 oleh K.H.A Wahab Hasbullah dan KH. Mas Mansur, Madrasah Salafiyah tahun 1919 oleh K.H Hasyim 'Asyari, Madrasah Muhamadiyah (umum-Islam), Madrasah Al-Irsyad tahun 1913 di Jakarta, Madrasah Diniyah pada tahun 1917, Madrasah Awaliyah pada tahun 1926 oleh Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya (Mulyanto, 2021; Mulyanto et al., 2019; Nuryati, 2010).

Madrasah dan sekolah diisi oleh berbagai golongan masyarakat. Hal ini sebuah tanda awal perempuan mulai mengisi peran di berbagai bidang, dan mendapatkan pendidikan walaupun kekusaan terhadap peran laki-laki dalam ranah publik masa itu sangat kuat. Adanya pengetahuan informal dan juga domestik bagi perempuan yang ditulis oleh PB X sebagai bentuk perhatian dan penyempurnaan ajaran serat *piwulang* bagian dari trik kelabuh secara simbolis.

Salah satu bentuk perwujudan politik simbolis adalah masakan. Sebuah kunci kebahagiaan bila mana sebuah kepuasan makanan/hidangan/sajian didapatkan. Karakteristik masakan kerajaan juga menjadi bagian dari sebuah kunci identitas, kehormatan, dan juga jati diri perempuan Kasunanan ditentukan. Kebutuhan seorang acacik (pengracik jamu) dan *koki* (pemasak) adalah hal yang tidak bisa dikesampingkan bahkan dianggap sangat penting dalam Kasunanan Surakarta, mengingat PB X merupakan susuhunan terkaya masa itu, tidaklah luput dari hubungan baik dengan pemerintah Hindia-Belanda yang turut menjamu dengan segenap makanan keunggulan keraton. PB X merupakan raja yang terkenal akan kesukaannya makan makanan enak (daging gelatin, dan nasi jemblung) yang kemudian makanan tersebut menjadi identitas makanan khas Surakarta (Aryoningprang et al., 2021; Kuntowijoyo, 2003; Mellyani & Kusumaningrum, 2020)

Di sisi lain, terdapat sebuah bangunan yang dibuat khusus dalam urusan memasak dan hidangan kasunanan, yakni sebuah dapur kasunanan bernama dapur Gondorasan yang di dalamnya terdapat struktur kepengurusan. Orang yang mengurus Gondorasan bernama Ibu

Gondoroso. Ibu Gondoroso merupakan ketua dari Dapur Gondorasan yang dibantu oleh asistennya yang bernama Ibu Nyai Soko Langgi dan beberapa pegawai lainnya. Dapur keraton juga digunakan sebagai penyedia makanan khusus bagi anggota keraton, di mana posisi dapur keraton terdapat di dalam keraton. Dapur keraton tidak dapat dimasuki oleh sembarang orang sebagaimana dapur gondorasan (Mellyani & Kusumaningrum, 2020). Sebagaimana catatan pendahulunya, terdapat sebuah jenis dan fungsi kuliner menurut waktu dan bentuknya, seperti dalam Serat Centini, berbagai macam jenis makanan menempati waktu dan fungsinya masing-masing. Entah jenisnya sebagai makanan, nyamikkan/cemilan dan minuman masing-masing memiliki waktu sajian pada pagi, siang atau sore dengan fungsi masing-masing antara sosial (penjamuan), ekonomi (perdagangan) ataupun sebagai ritual (kelengkapan upacara) (Sunjata et al., 2014). Budaya kerajaan sering mengadakan acara-acara persembahan leluhur, acara keagamaan, acara naik tahta, yang selalu menyajikan makanan sesaji dan makanan anggota kerajaan, serta tamu yang datang (Mellyani & Kusumaningrum, 2020). Sebagaimana posisi jamu keraton sebagai kebutuhan penjaga kesehatan bagi PB X dan keluarga. Pada masanya terdapat tradisi minum jamu, hal ini menandakan bahwa jamu adalah bagian dari kebutuhan pada masa itu. Jamu dikenal sebagai penjaga kesehatan sekaligus kekuatan raja menghadapi istri-istrinya baik permaisuri dan selir-selirnya sehingga PB X mendapat julukan sebagai “Raja terkuat” (Joebagio, 2015). Pengisian posisi tersebut menjadi sebuah sumbangsih pada tradisi Jawa terhadap berjalannya tradisi pengobatan

tradisional yang dilakukan secara turun temurun sejak 1814 M (dalam serat *Centhini*), 1831 M (dalam serat *Kawruh Bab Jampi-Jampi Jawi*) dengan berbagai teknik mulai dari persiapan pembuatan, pemilihan, dan cara penggunaan yang tepat.

Sebuah racikan ditulis oleh PB IX dalam naskah Serat *Racikan Boreh saha Pareh* yang bertahan sampai pada penulisan Serat *Naskah Husada* dan *Primbon Jampi Jawi* oleh PB X menerangkan tentang 120 spesies tanaman, yang terbagi menjadi 55 famili yang digunakan, 61 jenis ramuan dengan 17 macam kategori penggunaan, baik diminum, dan diolah (*boreh*, *lulur*, *tempel*, *masker*) (Shanthi & Izzati, 2014). Hal ini merupakan tanda adanya sebuah keberadaan orang-orang ahli dalam bidang masakan dan pengobatan yang bertugas untuk menjaga cita rasa demi mempertahankan sebuah identitas kuliner kerajaan dan bentuk kehormatan, sehingga dibutuhkan sebuah konsistensi di dalamnya baik proses, komposisi bahan masakan, sekaligus karakteristik di dalamnya, yang ini tentu tidak lepas dari adanya perempuan yang turut serta dan para abdi-abdi kerajaan dan juga rakyat dalam mengadakan segala hal yang dibutuhkan dalam kaitannya hal tersebut.

Tradisi dan budaya merupakan bagian dari kendali suatu masa dalam menjadikan sebuah sistem kehidupan yang baik. Sebagai mana Serat *Centhini* sangat berpengaruh pada sistem kehidupan di masa mendatang khususnya pada masa Pakubuwono X. Serat *Centhini* merupakan bukti sebuah ensiklopedia kebudayaan di mana serat ditulis dalam ragam *ngoko*, menggunakan huruf Jawa tulisan tangan (*manuscript*) dalam bentuk puisi *tembang macapat*

dan *sekar tengah* dengan 4.200 halaman yang terbagi dalam 798 dengan seluruh jumlah 12 jilid pada abad 19 (Susilantini, 2014). Membahas tentang sejarah, pendidikan, geografi, arsitektur, pengetahuan alam, falsafah, agama, tasawuf, mistik, ramalan, sulapan, ilmu magi, perlambangan, adat istiadat, tatacara (perkawinan, pindah rumah, berganti nama, menerima tamu, dan selamat dalam daur hidup), etika, pengetahuan sifat manusia, ilmu agama Islam (sudah tentu kosa kata Arab banyak ditulis di dalamnya) (Junanah, 2010). Hal ini tidak dapat dipungkiri menjadi bagian dari konstruksi pemikiran dan kesadaran masyarakat yang tentu juga menjadi sebuah tradisi dan karakteristik masyarakat secara turun temurun.

Berlanjut pada kemampuan-kemampuan perempuan sebagai penguat identitas dalam berbagai hal tradisi dan budaya kerajaan tidak lepas dari adanya proses pendidikan baik secara langsung atau tidak secara langsung, baik pengetahuan yang didapat dari sebuah pengajaran dan pengalaman yang terus dilalui. Kemampuan-kemampuan tidak lepas dari sebuah pengajaran yang tidak dipungkiri dari kasusuhunan Surakarta. Atas dasar kesadaran pemimpin adanya keharmonisan dan ketentruman hidup, tidak jarang para raja-raja turun memberi ajaran-ajaran dalam catatan-catatan, di mana penulisannya dilakukan secara mandiri ataupun di bantu oleh para punggawa kerajaan. Hal ini dilakukan oleh para pendahulu PB X atau semasa Pakubuwono meliputi PB IV (*Serat Wulang Reh*), PB V (*Serat Centhini*), PB VI (*Serat Pitutur*), PB VII (*Serat Tata Karma*, *Serat Nitik Banyunan*, *Angger-Agger Nagari*, dll), PB VIII, PB IX (*Serat Wulang Dalem*), sampai pada

PB X dalam Serat *Wulang Reh Putri* atau disingkat dengan SWRP.

Wujud perhatian adanya sebuah konsistensi dalam sebuah tatanan Kasunanan Surakarta, di mana perempuan dalam hirarki kasunanan harus mampu menghadapi sebuah tantangan dan juga tanggung jawab dalam sebuah rumah tangga dan keberlangsungannya sebuah tradisi. Serat *Wulang Reh* diciptakan oleh Pakubuwono IV tidak lain merupakan pengalaman-pengalaman pemikiran dan pemahamannya dalam menjalankan hidup. Di mana serat tersebut menunjukkan tentang pentingnya jati diri sebagai manusia dengan fitrah pemimpin di bumi, dan juga hamba yang memiliki kewajiban atas segala sesuatu yang ada di dunia yang meliputi tugas tanggung jawab, ciptaan Tuhan, hubungan sesama dan hubungan kepada Tuhan. Serat *Wulang Reh* menunjuk pada sebuah pentingnya jati diri suatu bangsa di mana sebuah citra diri ditentukan dari setiap generasi, termasuk pada masa Pakubuwono IV.

Kekacauan yang terjadi pada masa Pakubuwono IV melahirkan sebuah karya agar dapat menjadi sebuah perhatian, di mana sebuah tindakan yang harus dan tidak untuk dilakukan. Serat tersebut selanjutnya menjadi sebuah ajaran yang tentu memberi pengaruh besar dalam menumbuhkan kesadaran dan mengatur pola-pola kehidupan di masa Pakubuwono IV dan masa-masa generasi Pakubuwono selanjutnya (Oktavilani, 2018). Tampak pada pesan keselamatan Pakubuwono IV yang tidak menyebutkan ajaran atas perempuan dan laki-laki, namun pada pesan dalam tembang Pucung: bait 17 berbunyi *lawan maning ana pituturingsun, yen sira amaca, layang sembarang layange, aja pijer ketungkul ningali sastra* (dan ada lagi nasehatku,

jika anda membaca buku (surat), pahami isi layang tersebut, jangan terlalu asyik pada sartranya). Bait 18 berbunyi, *Ceritane ala becik dipunweruh, nuli rasakene, layang iku saunine, den karsa kang becik sira anganggoa* (cerita baik buruk harap diketahui, kemudian renungkan, rasakan bunyi seluruhnya, Anda renungkan mana yang baik itu anda pakai). Bait 19, *ing kang ala kaweruhane alanipun, dadine tyarira, weruh ala lawan becik, ing kang becik wiwitane sira wruha* (yang buruk harap diketahui buruknya, sehingga Anda dapat memahami, mengetahui yang baik dan yang buruk, yang baik anda utamakanlah lebih awal) (Widiyono, 2010)

Uraian di atas merupakan nasihat yang kemudian menjadi ajaran bagi generasi selanjutnya untuk tetap pada tradisi ketaatan pada pemimpin, dengan segala kemurahan hati menerima jatah ketetapan yang dicitrakan pada tiap klasifikasi sosial. Mengingat pada masa Pakubuwono VII, sebagai masa bertumbuh pesatnya sebuah karya sastra *Serat Nitik Bayunan, Angger-Agger Nagari*, dan lain sebagainya. Kedudukan seorang raja akan tanggungjawab keberlangsungan sebuah kerajaan merupakan tugas dan wewenang yang harus dijalankan, di samping sebuah kedudukan tinggi sebagai pemimpin tetaplah pada menjejakkan sebuah simbol dalam bentuk tindakan termasuk bahasa dan tatakrama maupun material. Hal ini tentu membutuhkan sebuah kesabaran dan kejelian dalam memaknai filosofinya (Ginangjar, 2017).

Pada *Serat Wulang Reh Putri*, bagian dari sebuah ajaran yang sengaja dituliskan oleh Pakubuwono X agar mampu diterima dan dijadikan pedoman bagi putri-putri sekaligus bekal pengetahuan demi menjaga kesejahteraan dan ketentrangan bersama. SWRP ditulis dalam

huruf aksara dan bahasa Jawa pada 4381 saka atau 1902 M (Hartiningsih, 2009). Serat tersebut berisikan tentang pengetahuan yang diperuntukkan untuk perempuan mengenai dunia pernikahan yang disajikan dalam bentuk tembang beraksara Jawa dan berbahasa Jawa. SWRP juga mengandung nasihat dan pengetahuan sekaligus hal-hal baru dalam kisah kehidupan ditambah informasi mengenai kehidupan berkeluarga atas hal-hal yang harus dilakukan dan tidak untuk dilakukan. Ajaran moral atau etika yang patut dilakukan oleh perempuan khususnya kalangan kerajaan juga dibahas. Di mana di kalangan kraton, pendidikan etika merupakan prioritas utama di samping unsur pendidikan lainnya. Etika sebagai satu ajaran moralitas yang memberi arah bagaimana sesungguhnya hidup yang religius sesuai dengan tuntunan agama dan norma sosial (Rimadu, 2020)

PB X memiliki 2 permaisuri dan 36 selir dan 63 anak (Aryoningprang et al., 2021). SWRP sengaja ditulis sebagai salah satu wujud nasihat dan perhatian PB X pada anak-anaknya yang tengah hidup pada kemewahan dan kemudahan, di samping pada masanya adalah sebuah masa transisi, dimana arus modernisasi mulai menampakkan diri yang dapat menggeser sistem sosial dan budaya mapan, sangat perlu untuk memberikannya sebuah pesan melalui tulisannya. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga keharmonisan dan menyambung estafet keluhuran terhadap perempuan-perempuan. Selain itu juga untuk mendidik anak-anak perempuan agar dapat menghadapi tantangan dan memiliki kepribadian baik.

Di antara nilai-nilai yang disampaikan dalam berbagai serat yang ditujukan pada

perempuan tidak lain berisikan tentang seputar pengetahuan perempuan dan kesiapannya menghadapi pernikahan sekaligus ajaran tingkah laku seorang istri, yakni meliputi: pengetahuan dan kemampuan atas kecakapan dalam berumah tangga beserta seluk-beluknya; sikap yang baik, baik perkataan, perbuatan, pertanyaan, dan ucapan yang dapat menunjukkan kesombongan; ketaatan, taat atas perintah, baik suami ataupun raja. Pada masa kerajaan, perintah raja bukanlah serta merta namun pada sebuah kebijaksanaan; kecintaan dan kesetiaan; ingat, dalam arti segala tindakan atas dasar pertimbangan untuk selalu berbuat pada kebaikan dan kebenaran. Dalam hal ini PB X menyimbolkan petunjuk tingkah laku seorang perempuan pada lima jari, yang bermakna sebuah kebaktian, taat pada petunjuk, dan perintah, serta menjaga nama baik rumah tangga maupun masyarakat dengan sikap lemah lembut, terampil, cerdas, dan cakap (Hartiningsih, 2009).

SIMPULAN

Kelahiran PB X atas *hayu* yang dimaksudkan membawa kebaikan bagi Kasunanan Surakarta yakni pencapaian masa kejayaan. PB X merupakan susuhunan yang mengalami himpitan kekuasaan pemerintah Hindia-Belanda. Ketetapan daerah kepemimpinan sebagai *Vornstenlanden* membuat sejarah baru dalam gaya pemerintahan di Kasunanan Surakarta. Sebagai pemenuhan tanggung jawab PB X sebagai susuhunan, menuntut optimalisasi atas integritas diri yang berpendidikan lebih sejak usia dini, dan pengalaman yang cukup dalam memanfaatkan kepiawaiannya dalam menciptakan berbagai strategi politik.

Dalam rangka pengembangan, pemberdayaan, dan dukungan atas kemajuan Kasunanan Surakarta nampak pada kontribusi nyata dalam hadirnya berbagai simbol dalam bentuk infrastruktur bangunan kasunanan, karya, tradisi, dan budaya. Berbagai bangunan penunjang kemakmuran kerajaan mulai dari tersediannya pengairan, transportasi, pasar sebagai central perdagangan, jembatan, bank, bangunan sekitar kerajaan, lestari tradisi-budaya, pendidikan, berdirinya sekolah, organisasi, tersebarnya surat kabar, dan cita-cita nasionalisme, menjadi bagian dari pencapaian dan keberhasilan PB X dalam menjalankan politik simbolisnya, hingga pada kelahiran sebuah budaya yang kemudian menjadi tradisi di Kasunanan Surakarta. Kejayaan kasunanan Surakarta tidak luput dari peranan perempuan dalam berbagai bentuk. Perempuan yang identikkan dengan seorang yang betutur kata halus, *kalem* (lemah lembut, *sabar lan neriman* (sabar dan menerima), patokan sebuah keharmonisan, patokan pencapaian kesuksesan, pemegang kendali ekonomi, seorang berkepribadian luhur, berbudi, berkarakter, sopan, santun, setia, dan berkarya penuh dalam berbagai bidang dan tugasnya masing-masing, serta berkontribusi secara nyata, menjadi bukti dukungan atas usaha Politik PB X. Perempuan berhasil memberikan kedudukan, kehormatan, penerus wangsa, sekaligus identitas diri bagi kerajaan melalui peran, karya, dan dirinya sendiri yang menjadikannya sistem kehidupan semakin teratur dan makmur.

PB X memberi bukti bahwa perempuan layak untuk mendapatkan berbagai kedudukan di berbagai struktur, ruang pendidikan, sekaligus peran dalam kehidupan bermasyarakatnya

melalui berbagai ruang kehidupan. Tulisan yang ditinggalkan susuhunan dan ruang yang telah disediakan bagi perempuan pada masa pemerintahannya adalah bukti di mana perempuan memiliki kedudukan tinggi dan berperan penting, sehingga harus diperhatikan, ditingkatkan, dan dijaga keberadaannya.

REFERENSI

- Adam dalam Joebagio, H. (2015). Politik Simbolis Kasunanan. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9 (2), 179–192.
- Anisah, S. S., & Tohjiwa, A. D. (2017). Pusat Batik Surakarta Hadiningrat di Laweyan, Surakarta. *Jurnal Ilmiah Desain & Konstruksi*, 15 (1).
- ANRI. (2014). *Citra Pemerintahan Kota Surakarta dalam Arsip*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Aryoningprang, B., Umasih, & Kurniawati. (2021). Pakubuwono X: Politik Oportunisme Raja Jawa (1893-1939). *ISTORIA Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 17 (1).
- Carlina, R. (2020). *Berpangku Pada Raja: Pengemis dalam Narasi Sedekah Paku Buwono X Tahun 1893-1939* [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- DK dalam Kuntowijoyo, K. (2003). Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915. *Humaniora*, 15 (2), 200–211.
- Ginanjari, R. W. (2017). Tata Krama Keluarga Sang Raja Menurut Serat Tata Krama PB. VII (Kajian Hermeneutik). *Conference on Language and Language Teaching*.
- Hartiningsih, S. (2009). *Serat Wulang Reh Putri* [Tesis]. Universitas Diponegoro.
- Joebagio, H. (2015). Politik Simbolis Kasunanan. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 9 (2), 179–192.
- Junanah, J. (2010). Kajian Morfosemantis Terhadap Serat Centhini. *Millah: Journal of Religious Studies*, 101–125.
- Koentjaraningrat. (2003). *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo, K. (2003). Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900-1915. *Humaniora*, 15 (2), 200–211.
- Mellyani, A., & Kusumaningrum, D. A. (2020). Potensi Kuliner Tradisional Khas Keraton Surakarta, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 5 (3), 302–312.
- Mulyanto, M. (2021). Peran Pakubuwono X dalam Pengembangan Dakwah Islam di Surakarta 1893-1939. *Mamba'ul'Ulum*, 17 (1), 24–36.
- Mulyanto, M., Saefudin, D., Husaini, A., & Bahtiar, T. A. (2019). Modernisasi Madrasah Awal

- Abad XIX: Studi Analisis Madrasah Mambaul Ulum Surakarta 1905-1945. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 8 (02), 369–396.
- Nuryati, S. (2010). *Mambaul 'Ulum Peningkatan Pengalaman dan Syiar Islam (Dinamika Pendidikan Islam dalam Mencetak Ulama di Surakarta 1905-1945)* [Skripsi]. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Oktavilani, V. R. (2018). *Etika Bernegara dalam Serat Wulang Reh Karya Pakubuwono IV* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rimadu, A. R. (2020). *Citra Perempuan Jawa dalam Serat Wulang Putri Karya Pakubuwono IV* [Skripsi]. IAIN Salatiga.
- Shanthi, R. V., & Izzati, M. (2014). Studi Etnobotani Pengobatan Tradisional untuk Perawatan Wanita di Masyarakat Keraton Surakarta Hadiningrat. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 6 (2), 61–69.
- Sumodiningrat dalam Aryoningprang, B. (2021). Pakubuwono X: Politik Oportunisme Raja Jawa (1893-1939). *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 17 (1), 1–11.
- Sunjata, W. P., Sumarno, & Mumfngati, T. (2014). *Kuliner Jawa dalam Serat Centhini*. Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB).
- Supriadi. (2017). *Dinamika Kehidupan Religius Era Kasunanan Surakarta*. Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. <https://lektur.kemenag.go.id/web/koleksi-245-dinamika-kehidupan-religius-kasunanan-surakarta>
- Susilantini, E. (2014). Kuliner Tradisional Jawa dalam Serat Centhini. *Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta*.
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*.
- Widiyono, Y. (2010). *Kajian Tema, Nilai Estetika, dan Pendidikan dalam Serat Wulangreh Karya Sri Susuhunan Pakubuwana IV* [Tesis]. Universitas Sebelas Maret Surakarta.